

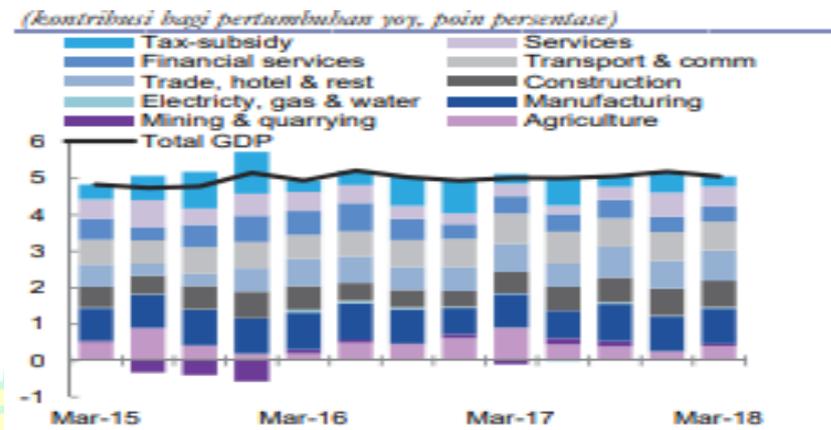
# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Abad kedua puluh merupakan abad dimana terjadi peningkatan drastis dalam populasi global, peningkatan penggunaan sumber daya alam, dan ekspansi industri yang pesat akibat kemajuan teknologi (Alister & Feller, 2005). Peningkatan drastis terjadi pada negara maju dan berkembang, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang di dunia yang mengalami peningkatan baik dari segi populasi maupun dari segi pembangunan di berbagai bidang. Guna menunjang berbagai pembangunan yang sedang berlangsung, Indonesia memiliki berbagai sumber pendapatan negara yaitu semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri (UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara).

Menurut sumber CEIC yaitu perhitungan oleh staff bank dunia pada keuangan di Indonesia dalam (World Bank, 2018) yang disajikan pada Gambar I.1 bahwa sektor manufaktur menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat sebesar 4,5%.



**Gambar I.1**

**Kontribusi pertumbuhan tiap sektor**

Sumber: World Bank (2018)

Sektor manufaktur menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar negara, dikarenakan banyaknya permintaan akan hasil manufaktur dan perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia yang bersaing berusaha mengevaluasi kinerja perusahaannya dengan perusahaan terbaik di dunia. Kinerja perusahaan merupakan salah satu tolak ukur baik buruknya perusahaan yang akan berpengaruh pada berhasil atau tidaknya usaha perusahaan dalam mencari keuntungan. Kinerja perusahaan bertujuan agar perusahaan dapat bersaing dan menghadapi pasar global (Sudana & Dwiputri, 2018).

Namun tidak sedikit perusahaan yang melakukan berbagai cara kurang sehat dalam bersaing hingga pada akhirnya malah berefek merugikan kinerja keuangannya sendiri, seperti fenomena yang dikutip dari berita online market.bisnis.com yang dipublikasi pada tanggal 24 Juli 2017 tentang “Ketika AISA ‘dihukum’ triliunan rupiah di pasar”. Kasus AISA bermula pada 20 Juli 2017 dimana terjadi penggerebakan pada pabrik anak usaha

AISA yaitu PT Info Beras Unggul (IBU) yang ditemukan melakukan pemalsuan kualitas beras dari beras rastra yang merupakan program beras untuk keluarga sejahtera penerima manfaat pemerintah menjadi beras premium yang dijual dengan harga tiga kali lipat dipasaran sebanyak 1.162 ton.

Menurut Menteri Pertanian Arman sulaiman temuan ini merupakan yang terbesar jika dilihat dari kuantitas beras yang ditimbun. Akibat kasus tersebut AISA mengalami penurunan laba bersih sebesar Rp502,5 M menjadi 103,5 M disebabkan lemahnya penjualan beras karena menurunnya kepercayaan masyarakat yang merasa tertipu dengan kualitas beras serta harga saham AISA yang anjlok 24,92% sehingga derasnya laju aksi jual oleh investor tidak dapat dihindarkan. Tanggapan dari manajemen AISA terkait kasus anak usahanya tersebut adalah penyangkalan yang mengklaim beras premium dijual dengan mutu sesuai standar nasional indonesia (SNI), namun tanggapan manajemen AISA tetap tak mampu menghentikan menguapnya kapitalisasi pasar AISA sekitar Rp2,4 triliun dari sekitar Rp7,5 triliun menjadi sekitar Rp5,1 triliun sepanjang periode tersebut.

Fenomena permasalahan perusahaan yang berakibat buruk dalam kinerja keuangan juga terjadi pada perusahaan raksasa jepang yang sudah berumur lebih dari seabad yaitu Toshiba. Dikutip dari berita online [finance.detik.com](http://finance.detik.com) yang dipublikasi pada tanggal 15 Februari 2017 tentang “Saham Toshiba Anjlok 12%”. Berawal dari inisiatif pemerintahan perdana menteri Abe yang mendorong transparansi perusahaan-perusahaan jepang,

alih alih menarik investor asing agar lebih banyak datang malah membuka permasalahan toshiba yang sudah lama terjadi yaitu *pressure* yang sangat tinggi dari eksekutif untuk manajemen memenuhi target performance unitnya. Dapat digambarkan secara sederhana fenomena yang terjadi yaitu misalnya dewan komisaris memberi target pertumbuhan 7% ke dewan direksi, alhasil dewan direksi memberikan target 10% pada setiap unit agar 7% dapat diamankan dan terakhir kepala unit memberikan target yang lebih besar pada tiap divisi, demikian seterusnya. Sehingga kepala unit menyaring catatan akuntansi menggelembungkan laporan keuangannya dan menjadikannya sebagai prosedur akuntansi dari kebijakan resmi manajemen.

Akibat dari terungkapnya kasus ini adalah terjadi penurunan saham Toshiba sekitar 10% sejak kasus diumumkan dan terus terjadi penurunan. Toshiba juga sudah diturunkan menjadi emitem lapis kedua di bursa saham Tokyo karena terkonfirmasi jumlah beban lebih besar dibanding aset. Budaya Jepang terkenal menjunjung tinggi etika dan moralitas, maka dari itu CEO, Wakil CEO, dan beberapa eksekutif lainnya mengundurkan diri.

Efek yang terjadi juga dirasakan oleh anak perusahaan Toshiba yaitu perusahaan tenaga nuklir yang bertempat di AS mengalami kerugian hingga sekitar 80 triliun rupiah akibat kasus yang terjadi pada badan Toshiba. Dan setelah salah satu komisaris Toshiba mundur akibat dugaan skandal akuntansi yang menyeretnya membuat saham toshiba jatuh hingga 12,23% dan diprediksi akan terus anjlok.

Selain karena fenomena-fenomena kasus yang terjadi, baik atau buruknya kinerja keuangan suatu perusahaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang ditunjukkan pada beberapa penelitian terdahulu yaitu Maryanti & Fithri (2017) yang menemukan bahwa dewan komisaris mempengaruhi kinerja keuangan, sementara Djuitaningsih & Ristiawati (2015) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh kinerja lingkungan dan kepemilikan asing. Sedangkan Narcisa (2016) menemukan bahwa di negara Romania kinerja keuangan dipengaruhi juga oleh *fee audit*, dengan salah satu sumber pendapatan yang sama dengan negara Indonesia yaitu manufaktur maka bisa jadi pada kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia juga dipengaruhi salah satunya oleh *fee audit*.

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang hijau dan bebas dari pencemaran, maupun masalah alam lainnya. Namun untuk kebanyakan perusahaan manufaktur, kinerja lingkungan menjadi salah satu kegiatan yang harus diperhatikan dan catatan yang harus di garis bawahi. Karena masih banyak perusahaan yang menggunakan segala cara dan membuat masalah guna mencapai kinerja perusahaan yang baik. Masalah tersebut muncul oleh pencemaran lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh semakin berkembangnya kegiatan industri yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan industri (Dunlap & Scarce, 1991). Selain alih fungsi lahan, rendahnya kesadaran perusahaan terkait akan dampak pencemaran lingkungan dari aktivitas perusahaannya juga menjadi penyebabnya.

Banyak perusahaan manufaktur yang aktivitasnya memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan dan masyarakat, padahal menurut *legitimacy theory* perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai *justice* dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Sayekti & Wondabio, 2017). Maka dari itu, jika perusahaan ingin bertahan perlu memperhatikan 3P, yakni bukan hanya *profit* yang dikejar, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan aktif menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Handi & Irawan, 2008).

Sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945 tertuang hak atas lingkungan, Pasal 9 Ayat (3) UU No 39 /1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan pasal 65 Ayat (1) UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka dari itu wajib bagi Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut. Salah satu bentuk dukungan dan tanggung jawab pemerintah adalah membentuk program penilaian terkait pelaksanaan tersebut dengan pembuatan Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) pada tahun 2002 yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Kinerja perusahaan pada PROPER diukur menggunakan indikator warna, yakni warna emas sebagai indikasi peringkat kinerja paling baik diberi skor 5, kemudian warna hijau, biru, merah, dan hitam untuk indikasi penilaian terburuk dengan skor 1.

Jika kinerja perusahaan mendapat peringkat PROPER yang baik, tentu saja akan mempengaruhi reputasi perusahaan itu sendiri. Selain menggunakan PROPER, bentuk dukungan lain dari pemerintah adalah mengeluarkan PP No.27/2012 tentang mandat wajib yang harus dicantumkan pada *firms report* yaitu analisis dampak lingkungan, atau perusahaan juga bisa menggunakan ISO 14001. Karena di era globalisasi saat ini isu-isu sosial seperti pendidikan, hak asasi kemanusiaan, dan isu lingkungan seperti, pencemaran lingkungan, pembajakan liar sangat diperhatikan oleh negara-negara maju khususnya Eropa dan Amerika Serikat. Selain mendapatkan reputasi yang bagus, perusahaan yang memperhatikan isu-isu sosial akan lebih mempunyai nilai positif dan menarik perhatian investor karena mengurangi salah satu penyebab masalah di masa yang akan datang. Dengan melihat kinerja lingkungan perusahaan yang baik, maka akan lebih banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan, sehingga meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan (Nofiyana, 2011).

Namun penelitian yang dilakukan oleh Rokhmawati et al., (2015) menunjukkan sebaliknya, bahwa kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja keuangan. Malah menyebabkan pengeluaran biaya yang lebih besar, karena biaya untuk mempersiapkan penilaian lingkungan cukup mahal.

Sedangkan hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Djuitaningsih & Ristiawati (2015) yang menyatakan bahwa kinerja

lingkungan berpengaruh pada kinerja keuangan dengan menggunakan peringkat PROPER, dimana perusahaan yang memiliki peringkat PROPER baik dapat memperoleh akses yang baik untuk pendanaan karena Bank Indonesia mewajibkan bank-bank komersial di Indonesia untuk menilai perusahaan salah satunya dari *enviromental performance* (Bank Indonesia, 2005). Selain dari Bank Indonesia, pendanaan juga lebih mudah didapatkan dari investor asing dengan peringkat PROPER yang baik.

Investor asing merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi pendanaan dalam perusahaan, yang berarti bisa mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dengan presentasi kepemilikan asing yang besar kebanyakan berkinerja dengan lebih baik dalam hal profitabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Chaerunisa & Dini Wahjoe (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dikarenakan perusahaan dengan presentase kepemilikan asing yang besar akan memiliki kontrol dan monitoring yang lebih baik terhadap manajemen sehingga laporan keuangan perusahaan lebih transparan dibandingkan perusahaan yang bukan multinasional sehingga kinerja perusahaan semakin baik. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Dewata et al. (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan *investor* asing yang menanamkan sahamnya pada perusahaan tidak ikut andil pada urusan jalannya perusahaan serta dalam pengambilan keputusan guna kemajuan

kinerja keuangan perusahaan, pengambilan keputusan diwakilkan oleh dewan komisaris selaku pengawas perusahaan.

Kinerja keuangan adalah cerminan kesehatan suatu perusahaan, maka dari itu salah satu faktor turun naiknya kinerja keuangan bisa berasal dari internal perusahaan yang sangat dibutuhkan guna menunjang peningkatan kinerja perusahaan. Salah satunya adalah opini dan/ keputusan yang berasal dari internal perusahaan seperti misalnya dewan komisaris. Menurut peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini sejalan dengan penelitian Maryanti & Fithri (2017) yang memaparkan bahwa keberadaan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena salah satu tugas dewan komisaris adalah pengawasan maka dengan adanya tugas ini keberadaan dewan komisaris dapat meminimalisir adanya tindak manajemen perusahaan yang tidak bersih dan tidak transparan agar operasional berjalan dengan semestinya serta menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lukas & Basuki (2015) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh, karena komisaris hanya untuk pemenuhan regulasi yaitu pemberi saran bagi direksi dan tidak terjun langsung pada aktivitas operasional untuk kelangsungan kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja perusahaan yang stabil adalah gambaran kondisi manajemen perusahaan yang baik. Kondisi perusahaan tersebut tercermin pada laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Maka dari itu, dilakukan kegiatan untuk memeriksa atau memastikan laporan keuangan agar relevan dan kredibel yaitu dengan dilakukan proses *audit* oleh *auditor* yang independen. Penelitian terdahulu belum ada yang menguji pengaruh *fee audit* terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia, namun peneliti menduga *fee audit* dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan semakin besar nama dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan semakin besar pula biaya audit yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar dan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada umumnya lebih menginginkan perusahaannya diaudit oleh KAP besar dan ternama. Hal ini dikarenakan kepercayaan investor akan meningkat ketika perusahaan diaudit oleh KAP besar dan ternama tersebut. Peningkatan kepercayaan investor ini diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Masih adanya pertentangan hasil antar penelitian terdahulu, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan khususnya kinerja lingkungan, kepemilikan asing, dewan komisaris dan *fee audit* yang belum ditemukan penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Asing, Dewan Komisaris, dan *Fee audit* Terhadap Kinerja Keuangan”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas diharapkan tercapai tujuan yang sudah direncanakan, maka berikut tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *fee audit* terhadap kinerja keuangan.

#### D. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini memiliki suatu pembaruan dari penelitian sebelumnya, karena penelitian ini akan menguji pengaruh kinerja lingkungan, kepemilikan asing, dewan komisaris, dan *fee audit* berbarengan dengan alat ukur *earning per share* terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan sektor industri pengolahan, manufaktur, dan pertambangan di Indonesia. Selain itu, terdapat salah satu variabel yaitu *fee audit* yang belum pernah diuji pengaruhnya terhadap kinerja keuangan di perusahaan sektor industri pengolahan, manufaktur, dan pertambangan di Indonesia.

Data yang diambil untuk menunjang penelitian ini didapat dari *annual report* perusahaan sektor industri pengolahan, manufaktur, dan pertambangan di Indonesia yang terdaftar pada bursa efek Indonesia pada tahun 2017-2018. Penelitian ini penting dilakukan sebagai acuan atau landasan bagi berbagai pemangku kepentingan terhadap perusahaan-perusahaan sektor industri pengolahan, manufaktur, pertambangan di Indonesia.

